



MANUAL IKU

PPN PALABUHANRATU

2026



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Manual Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2026 dapat diselesaikan. Manual IKU ini disusun untuk digunakan agar pencapaian tujuan organisasi dapat di kelola secara lebih efektif dan efisien di dalam mendukung pencapaian target dan sasaran strategis PPN Palabuhanratu Tahun 2026. Manual IKU ini disusun untuk dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja lingkup KKP dalam melaksanakan pengukuran dan capaian kinerja terhadap target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Serta untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja PPN Palabuhanratu.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Manual IKU. Semoga bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja PPN Palabuhanratu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Palabuhanratu, 15 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono

	INDIKATOR KINERJA	Halaman
1	Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Palabuhanratu	4
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu	5
3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu	6
4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	7
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu	8
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu	9
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu	10
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	11
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	12
10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK)	14
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu	15
12	Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu	16
13	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu	17
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu	18
15	Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu	19
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu	20
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Palabuhanratu	21
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu	22

Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di PPN Palabuhanratu

Nama IKU

Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu

Deskripsi

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan & Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/ badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/ pemanfaatan sumber daya & hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan & belanja negara dari sektor kelautan & perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) & hak negara lainnya (TGR & denda tidak termasuk pelaksanaan tugas & fungsi)

Formula Perhitungan

Merupakan nilai PNBP dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab IKU Atasan

Tim Kerja Tata Kelola & Pelayanan Usaha (TKPU)



Satuan Pengukuran

Juta Rupiah



Sumber Data

Tim Kerja TKPU



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target 2026

1.176,29



Jenis Aspek Target

Kuantitas



Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat
Nama IKU	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di wilayah PPN Palabuhanratu dalam bentuk basah
Formula Perhitungan	$Prod_{\text{perikanan Tangkap}} = Prod_{\text{PTL}} + Prod_{\text{PTPD}}$ Keterangan: $Prod_{\text{PTL}}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut $Prod_{\text{PTPD}}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Penanggung Jawab IKU Atasan	Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Satuan Pengukuran

Ton

Sumber Data

Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Validitas

Outcome

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Triw ulanan

Metode Cascading

Komponen Pembentuk

Target 2026

6.500

Jenis Aspek Target

Kuantitas

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing
Nama IKU	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu
Deskripsi	- Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. - Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.

Formula Perhitungan	Indikator I : $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$
	Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %
	Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2

Penanggung Jawab IKU Atasan Tim Kerja Tata Kelola & Pelayanan Usaha (TKPU)

Satuan Pengukuran

Persen



Sumber Data

Tim Kerja TKPU



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target 2026

100



Jenis Aspek Target

Kuantitas



Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang optimal dan bertanggung jawab	
Nama IKU	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	
Deskripsi	Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.	
Formula Perhitungan	$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$ Parameter penilaian meliputi: Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).	Keterangan : 1. Sangat baik jika NK = (86 - 100) 2. Baik jika NK = (66 - 85) 3. Sedang jika NK : (46- 65) 4. Kurang jika NK = (0 - 45)
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu	

Satuan Pengukuran

Nilai



Sumber Data

Aplikasi PPP PPN Palabuhanratu Ditjen Perikanan Tangkap



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan Data

Rata-rata



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Buat Baru



Target 2026

87



Jenis Aspek Target

Kualitas



Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
Deskripsi	Merupakan indikator yang menunjukkan: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100] \dots\dots\dots (x3)$ Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3
Penanggung Jawab IKU Atasan	Tim Kerja Kesyahbandaran

Satuan Pengukuran

Persen



Sumber Data

Tim Kerja Kesyahbandaran



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target 2026

36



Jenis Aspek Target

Kuantitas



Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal	
Nama IKU	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu	
Deskripsi	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.	
Formula Perhitungan	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$	
Penanggung Jawab IKU Atasan	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	

Satuan Pengukuran



Persen

Sumber Data



Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Validitas



Output Kendali Rendah

Perhitungan Data



Nilai Posisi Akhir

Polarisasi



Maximize

Periode Pelaporan



Tahunan

Metode Cascading



Buat Baru

Target 2026



60

Jenis Aspek Target



Kualitas

Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal dan bertanggung jawab

Nama IKU

Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Deskripsi

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Formula Perhitungan

Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)

Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (**SELARASKAN**)

Kategori : Kurang : 0-30; Cukup : >30-60; Baik : >61 – 80; Sangat Baik : >81 – 100

Keterangan:

Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)

Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Satuan Pengukuran

Nilai

Perhitungan Data

Rata-rata

Metode Cascading

Buat Baru

Penanggung Jawab IKU Atasan

Sumber Data

Tim Kerja TKPU dan Dukman

Polarisasi

Maximize

Target 2026

33

Validitas

Output Kendali Tinggi

Periode Pelaporan

Triwulanan

Jenis Aspek Target

Kualitas

Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Sasaran Strategis	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Deskripsi	Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh PPN Palabuhanratu
Formula Perhitungan	Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh PPN Palabuhanratu Keterangan: Nilai TW I = capaian 2025 + TW I; Nilai TW II = capaian 2025 + TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2025 + TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian 2025 + TW I + TW II + TW III + TW IV
Penanggung Jawab IKU Atasan	Tim Kerja Kesyahbandaran

Satuan Pengukuran

Kapal

Sumber Data

Petugas Kelaikan Kapal Perikanan

Validitas

Output Kendali Tinggi

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Triwulanan

Metode Cascading

Buat Baru

Target 2026

310

Jenis Aspek Target

Kuantitas

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Sasaran Strategis

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Palabuhanratu

Nama IKU

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Deskripsi

- Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.
- Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.
- Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:
 - Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
 - Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
 - Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
 - Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Satuan Pengukuran

Nilai



Sumber Data

Tim Kerja Kesyahbandaran



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan Data

Rata-rata



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Buat Baru



Target 2026

0,28



Jenis Aspek Target

Kuantitas



Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Formula Perhitungan Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

Penanggung
Jawab IKU Atasan

Tim Kerja Kesyahbandaran

$$(1) \text{ Kepatuhan s.d. 5 GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$$

$$(2) \text{ Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$$

$$(3) \text{ Kepatuhan >30 s.d. 100 GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$$

$$(4) \text{ Kepatuhan } \geq 100 \text{ GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$$

$$(5) \text{ Kepatuhan } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$$

$$(6) \text{ Kepatuhan } \geq 300 \text{ GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$$

$$\text{Total Nilai} = \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$$

Keterangan :

- (a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB
- (b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)
- (c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)
- (d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)
- (e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)
- (f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)
- (g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)
- (h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK)

Sasaran Strategis	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK)
Deskripsi	Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di PPN Palabuhanratu yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja.
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Nilai

Sumber Data

PPN Palabuhanratu

Validitas

Output Kendali Tinggi

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Tahunan

Metode Cascading

Buat Baru

Target 2026

75,50

Jenis Aspek Target

Kualitas

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada PPN Palabuhanratu berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh PPN Palabuhanratu yang menjadi objek pengawasan.
Formula Perhitungan	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ Keterangan: RHP= Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan $\sum N_t$= Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT $\sum N$= Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Persen (%)



Sumber Data

Itjen KKP



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Dipersempit



Target 2026

86



Jenis Aspek Target

Kualitas



Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
Formula Perhitungan	Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Nilai

Sumber Data

Sekretariat DJPT

Validitas

Output Kendali Tinggi

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Tahunan

Metode Cascading

Dipersempit

Target 2026

88,20

Jenis Aspek Target

Kualitas

Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Indeks



Sumber Data

Aplikasi Ropeg
Biro SDMAO KKP



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Dipersempit



Target 2026

84,50



Jenis Aspek Target

Kualitas



Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di PPN Palabuhanratu. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
Formula Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Persen (%)

Sumber Data

Aplikasi SIRUP

Validitas

Output Kendali Tinggi

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Triwulanan

Metode Cascading

Komponen Pembentuk

Target 2026

77

Jenis Aspek Target

Kualitas

Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup PPN Palabuhanratu yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%); • Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Persen (%)

Sumber Data

Inspektorat Jenderal KKP

Validitas

Output Kendali Tinggi

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Tahunan

Metode Cascading

Dipersempit

Target 2026

82

Jenis Aspek Target

Kualitas

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu

Nama IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPA PPN Palabuhanratu

Deskripsi Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula Perhitungan **Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9)Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi.**

Penanggung Jawab IKU Atasan PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran



Nilai

Sumber Data



Aplikasi OM-SPAN
Kemenkeu

Validitas



Output
Kendali Tinggi

Perhitungan Data



Nilai
Posisi Akhir

Polarisasi



Maximize

Periode Pelaporan



Semesteran

Metode Cascading



Dipersempit

Target 2026



92,10

Jenis Aspek Target



Kualitas

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
Formula Perhitungan	NKPA PPN Palabuhanratu didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Satuan Pengukuran

Nilai

Sumber Data

Aplikasi Monev
SMART DJA
KEMENKEU

Validitas

Output
Kendali Rendah

Perhitungan Data

Nilai
Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode
Pelaporan

Tahunan

Metode
Cascading

Komponen
Pembentuk

Target
2026

71,75

Jenis
Aspek Target

Kualitas

Penanggung
Jawab IKU Atasan

PPN Palabuhanratu

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu

Sasaran Strategis	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu
Nama IKU	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu
Deskripsi	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP
Penanggung Jawab IKU Atasan	PPN Palabuhanratu

Satuan Pengukuran

Indeks

Sumber Data

PPN Palabuhanratu

Validitas

Output Kendali Tinggi

Perhitungan Data

Nilai Posisi Akhir

Polarisasi

Maximize

Periode Pelaporan

Triwulanan

Metode Cascading

Dipersempit

Target 2026

88,80

Jenis Aspek Target

Kualitas



PPN PALABUHAN RATU

TERIMA KASIH

2026

